



Pemkot Yogya Fokus Tingkatkan Layanan Publik

YOGYA (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk unit kerja kecamatan dan kelurahan serta sekolah. Ditargetkan tahun 2015 semua instansi harus mampu menyesuaikan standar pelayanan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009.

Kabag Organisasi Pemkot Yogyakarta Kris Sardjono Sutedjo menuturkan perbaikan itu adalah tindak lanjut dari nilai rapor pelayanan publik dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY Jawa Tengah pada 13 SKPD. Namun juga akan dikembangkan ke 250 instansi, unit kerja dan sub unit kerja.

"Seminggu ini kami fokus untuk 13 SKPD yang dinilai masih ada kekurangan," terang Kris usai workshop pelayanan publik bersama ORI DIY Jateng di Balaikota Jumat (23/5).

Perbaikan difokuskan pada informasi pelayanan publik dan standar pelayanan seperti harus ada kepastian waktu dan biaya. Dia mengatakan selama ini sebenarnya tiap instansi sudah memiliki standar pelayanan publik. Namun mengacu pada standar pelayanan pada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Kalau mengacu Menpan RB, informasi itu tidak wajib ditempel. Tapi ke depan informasi pelayanan publik ini akan kami tempel. Termasuk informasi lokasi toilet di instansi pelayanan," urainya.

Menurutnya upaya tersebut tidak membutuhkan biaya mahal sehingga seluruh SKPD,

instansi dan unit kerja bisa memenuhinya. Termasuk dapat menerapkan semuanya pada tahun depan.

"Targetnya SKPD yang masih dapat rapor merah atau kuning dari ORI, dengan perbaikan pelayanan dapat meraih rapor hijau," papar Kris.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan ORI DIY Jateng Budhi Masthuri menilai Pemkot Yogya sudah berkomitmen memperbaiki kualitas layanan publik di seluruh SKPD, instansi, dan unit kerja. Seluruh SKPD sebenarnya sudah memiliki standar pelayanan publik, namun kurang diinformasikan.

"Padahal, informasi itu penting. Terutama kepastian waktu, dan biaya. Kalau tidak ada itu berpotensi untuk mengulur-ulur waktu dan tambahan biaya bisa terjadi," kata Budhi.

Informasi pelayanan tersebut dapat ditampilkan melalui banner, website, atau papan informasi di setiap SKPD, dan instansi. ORI DIY Jateng akan menilai kembali secara tertutup, SKPD juga diberi kesempatan menilai sendiri.

Hasil penilaian itu akan digabungkan dan dikirim ke ORI pusat. Pada 18 Juli, akan diserahkan penghargaan bagi SKPD yang masuk kategori kepatuhan tertinggi pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009. Tanggal tersebut juga bersamaan dengan pencaanangan sebagai Hari Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan survei yang dilakukan ORI pada akhir 2013, masih ada 6 dari 13 SKPD di lingkungan Pemkot Yogya yang mendapat rapor merah.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005